



Buletin Parlementaria



Komisi VI Apresiasi Pembangunan Rusun Berbasis TOD



3 Titik
Permasalahan
Kasus
Meikarta Harus
Ditemukan



4 Gus Muhaimin
Kecam
Pembakaran
Alquran di
Swedia

Nomor 1233/II/II/2023 • Februari 2023



9 772614 339005



Komisi VI Apresiasi Pembangunan Rusun Berbasis TOD

Komisi VI DPR RI mengapresiasi pembangunan Rumah Susun (Rusun) Samesta Mahata

Serpong berbasis *Transit Oriented Development* (TOD) di Stasiun Rawa Buntu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pembangunan rusun tersebut merupakan sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan, dengan Kementerian Perhubungan, PT. KAI dan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima pada saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi VI DPR RI di lokasi pembangunan Rusun Samesta Mahata. "Kami sangat mengapresiasi pembangunan Rumah Susun berbasis TOD ini karena memang masyarakat sangat membutuhkan hunian yang dekat dengan sarana transportasi," ujarnya, Jumat (27/1).

Menurut Politisi PDI-Perjuangan ini, rusun berbasis TOD ini merupakan hunian alternatif selain rumah tapak yang dapat menjadi pilihan tempat tinggal masyarakat. Untuk itu, sinergi antara Kementerian/ Lembaga pemerintah dengan BUMN sangat dibutuhkan. Nantinya rusun yang dibangun di kawasan Stasiun Rawa Buntu akan memiliki dua menara khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sehingga tidak hanya untuk komersial.

Lebih lanjut, Aria Bima menjelaskan konsep hunian berbasis TOD merupakan upaya pengembangan perkotaan yang

menuntut keterpaduan antar pola dan struktur ruang wilayah. Hal itu mulai dari perumahan, komersial, dan ruang rekreasi dengan sarana transportasi umum yang dapat dijangkau masyarakat dengan berjalan kaki.

"Salah satu keuntungan tinggal bagi masyarakat di TOD adalah mereka bisa diantar jemput kereta api saat melakukan mobilisasi dari tempat tinggal ke tempat kerja. Jadi, ada integrasi antara hunian dengan transportasi publik lainnya," terang Aria Bima.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro mengatakan selain Rusun Samesta Mahata

Serpong, saat ini juga ada beberapa Rusun berkonsep TOD yang juga sedang dalam proses pembangunan, yaitu Rusun TOD di Stasiun Tanjung Barat, Stasiun Pondok Cina dan Stasiun MRT Lebak Bulus.

Menurutnya, terdapat keuntungan lain yang dapat diperoleh masyarakat jika nantinya memilih tinggal di rumah susun TOD. Keuntungannya adalah tersedianya hunian layak, transportasi murah-mudah, dan yang paling penting bisa ikut serta dalam mengurangi polusi udara karena penggunaan kendaraan pribadi bisa berkurang.

man/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



FOTO: MAN/PDT
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima pada saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi VI DPR RI di lokasi pembangunan Rusun Samesta Mahata.

Titik Permasalahan Kasus Meikarta Harus Ditemukan



FOTO: YGA/PDT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco saat diwawancarai awak media.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengungkapkan bahwa pihaknya meminta

kepada komisi teknis di DPR untuk melakukan supervisi terkait kasus Meikarta guna menemukan titik masalah utamanya. Diketahui, belum lama ini Pihak PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU), yang merupakan pengembang Meikarta melakukan gugatan terhadap 18 konsumen.

Hal itu karena para konsumen tersebut meminta pengembalian dana (*refund*) lantaran unit apartemen mereka tak kunjung rampung dibangun. "Jangan sampai kemudian masyarakat banyak yang dirugikan," ujar Dasco kepada media di Gedung Nusantara III, DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/1).

Belum lama ini pula, komisi VI DPR RI telah melakukan panggilan perdana kepada PT MSU selaku pengembang Meikarta. Namun, PT MSU tidak hadir tanpa memberikan penjelasan kepada Komisi VI DPR RI. Diketahui, RDPU tersebut digelar usai sidang perdana gugatan PT MSU ke 18 konsumen Meikarta yang meminta pengembalian dana (*refund*) lantaran unit apartemen mereka tak kunjung rampung.

Mohamad Hekal, selaku pimpinan rapat Komisi VI DPR RI dalam kesimpulan RDPU menyampaikan bahwa akan melakukan rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan mengirim undangan kedua kepada Presiden Direktur PT MSU dan mengundang Lippo Group.

hal/rdn



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimmbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonce Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afrhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahahan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Gus Muhaimin Kecam Pembakaran Alquran di Swedia

Dakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengecam insiden pembakaran Alquran yang dilakukan oleh ekstrimis sayap kanan Swedia-Denmark di depan kedutaan besar Turki di Stockholm, Swedia, beberapa waktu lalu. Selain bertentangan dengan nilai keislaman, pria yang kerap disapa Gus Muhaimin itu menyebut aksi tersebut dapat memicu ketegangan antar umat beragama di dunia.

"Saya tentu saja mengecam keras aksi pembakaran Kitab Suci Alquran di Swedia, itu bukan saja tidak sesuai dengan nilai keagamaan dan toleransi, malah lebih dari itu bisa memicu ketegangan," katanya usai menghadiri acara dialog Kehidupan Islam di Indonesia dan di Rusia bersama Dubes Rusia Lyudmila Vorobieva di Ponpes Nurul Iman, Cibaduyut, Kota Bandung, Selasa (24/1).

Dalam pernyataan tertulis yang diterima **Parlementaria**, Politisi Fraksi PKB itu mendorong aparat setempat untuk menindak tegas pelaku pembakaran Alquran. Di sisi lain Legislator Dapil Jawa Timur VIII tersebut juga mengimbau seluruh umat Islam untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan aksi tersebut.

"Membakar Alquran itu jelas melukai umat Islam, saya mendorong aparat kepolisian di Swedia menindak tegas para pelaku. Tapi yang paling penting kita (umat Islam) harus tetap tenang, tidak terprovokasi dengan aksi itu," tukas Pimpinan DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.

Diketahui, aksi pembakaran Alquran di depan kedutaan besar



FOTO: JKA/PDT

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri acara dialog Kehidupan Islam di Indonesia dan di Rusia bersama Dubes Rusia Lyudmila Vorobieva di Ponpes Nurul Iman, Cibaduyut, Kota Bandung, Selasa (24/1/2023).

Turki di Stockholm, Swedia itu dilakukan oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Garis Keras, yang juga berkewarganegaraan Swedia.

”

MEMBAKAR ALQURAN ITU JELAS MELUKAI UMAT ISLAM, SAYA MENDORONG APARAT KEPOLISIAN DI SWEDIA MENINDAK TEGAS PARA PELAKU. TAPI YANG PALING PENTING KITA (UMAT ISLAM) HARUS TETAP TENANG, TIDAK TERPROVOKASI DENGAN AKSI ITU.

Dilansir dari berbagai sumber, aksi itu merupakan protes terhadap Islam dan apa yang disebut upaya Presiden Turki Tayyip Erdogan untuk mempengaruhi kebebasan berekspresi di Swedia.

Kepada media, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) berencana akan memanggil Dubes Swedia di Indonesia untuk dimintai penjelasan. Kecaman dari negara Arab, termasuk Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait juga telah dilayangkan terkait dengan peristiwa tersebut. "Arab Saudi menyerukan untuk menyebarkan nilai-nilai dialog, toleransi, dan hidup berdampingan, serta menolak kebencian dan ekstremisme," kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan.

[uc/rdn](#)



Komisi I Perjuangkan Alokasi Anggaran Alutsisa Korem 072 Pamungkas

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengungkapkan keprihatinannya

mendengar pemaparan dari Komandan Resor Militer (Danrem) Brigjend TNI Puji Cahyono bahwa Komando Resor Militer (Korem) 072/Pamungkas mengalami kekurangan ketersediaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Mendengar hal tersebut, Utut Adianto menegaskan pihaknya bersama dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI AD, berkomitmen memperjuangkan alokasi anggaran guna pemenuhan alusista dan sarana dan prasarana (sarpras) pendukung.

"Setelah mendengar seluruh paparan dari Danrem 072/Pamungkas terkait kekurangan Alutsista, sarpras salah satunya kendaraan sebagai sarana transportasi dan angkut prajurit yang sangat terbatas bahkan ada yang sudah 20 tahun, kami sebagai anggota dewan sangat prihatin dan akan memperjuangkan alokasi anggaran dengan mitra terkait dalam hal ini Kemhan dan TNI AD agar dapat mengoptimalkan fungsi serta kinerja Korem," ujar Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi I DPR RI ke Yogyakarta, Kamis, (26/1).

Dengan kekurangan alutsista dan sarpras, seperti transportasi, tentu akan berdampak pada mitigasi ancaman potensial oleh Korem 072/Pamungkas. Juga secara tidak langsung menghambat dukungan



FOTO: BLF/PDT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi I DPR RI ke Yogyakarta, Kamis, (26/01/2023).

dan bantuan apabila dibutuhkan langkah kontijensi. Terlebih, di Yogyakarta, menurutnya, banyak sekali isu-isu strategis, di antaranya isu kebencanaan, bibit radikalisme atau terorisme, ditambah persiapan pemilu serentak 2024 maupun isu keamanan lainnya.

”

KITA PAHAM BAHWA MEREKA INI (MEMEGANG TEGUH) SAPTAMARGA. SEHINGGA, DALAM KEADAAN SULIT ATAU YANG BELUM BISA SEMUA TERPENUHI, MEREKA TETAP BEKERJA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.

Namun begitu, di tengah segala keterbatasan yang dimiliki tersebut, Korem 072/Pamungkas tetap berupaya sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Atas dasar itu, Komisi I mengapresiasi kinerja Korem 072/Pamungkas karena dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal dalam menjaga kondusivitas serta mencegah gangguan dan ancaman khususnya di wilayah D. I. Yogyakarta.

"Kita paham bahwa mereka ini (memegang teguh) Saptamarga. Sehingga, dalam keadaan sulit atau yang belum bisa semua terpenuhi, mereka tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami sangat mengapresiasi seluruh jajaran di Korem 072/Pamungkas karena tetap menjalankan fungsinya. Kami pun akan membawa permasalahan ini ke Raker maupun RDP bersama para mitra untuk ditindaklanjuti," tutup Utut. **blf/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Legislator Pastikan Bawaslu Dapat Akses Sidalih Secara Penuh

Anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus memastikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan akses penuh dalam penggunaan Sistem Pendataan Pemilih (Sidalih). Diketahui, Sidalih digunakan untuk proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang telah terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.


"Artinya, Bawaslu juga bisa mengawasi ke Dukcapil. Kemudian juga proses pemutakhiran data dan penyesuaian daftar pemilih melalui Sidalih tidak menghilangkan dan/ atau menggunakan hak milik warga negara Indonesia," ujar Ihsan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Gubernur Jambi beserta KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan Forkopimda Jambi, di Kantor Gubernur Provinsi Jambi, Rabu (25/1). Kunspik ini dalam rangka mengecek kesiapan tahapan Pemilu Serentak 2024.

Di sisi lain, ia mengatakan, Komisi II bersama Kemendagri, KPU, dan DKPP telah menyetujui tiga rancangan Perbawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih, serta Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD. Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk perhatian positif Komisi II kepada Bawaslu.

"Kemarin kita sudah menyetujui adanya perubahan Perbawaslu yang baru. Ada tiga hal, yaitu permasalahan di DPD, kemudian Gakkumdu dan juga permasalahan

lain," ungkapnya. Selain itu, Ihsan juga mengingatkan agar Pemilihan Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Jambi yang

baru tidak menghambat kinerja untuk tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Jangan sampai, tegasnya, pemilihan komisioner itu merusak kekompakan yang telah terbangun sejauh ini.

"Jangan sampai kinerjanya kemudian jadi mundur. Siapa pun yang nanti akan terpilih, kita harapkan memang betul-betul orang yang berintegritas dan berkapasitas. Kalau misalnya ada intervensi, Komisi II siap untuk memastikan netralitas dari pemilihan itu sendiri," pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.  **ais/rdn**

”

JANGAN SAMPAI KINERJANYA KEMUDIAN JADI MUNDUR. SIAPA PUN YANG NANTI AKAN TERPILIH, KITA HARAPKAN MEMANG BETUL-BETUL ORANG YANG BERINTEGRITAS DAN BERKAPASITAS. KALAU MISALNYA ADA INTERVENSI, KOMISI II SIAP UNTUK MEMASTIKAN NETRALITAS DARI PEMILIHAN ITU SENDIRI

FOTO: AIS/PDT



Anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Gubernur Jambi.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pengkajian Status Jabatan dan Kesejahteraan Perangkat Desa Perlu Didorong



FOTO: IKA/PPDI

Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro saat ditemui Parlementaria usai RDPU dengan Paguyuban Pamong Desa Indonesia (PPDI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa, (24/1/2023).

Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro mendorong pengkajian kejelasan status perangkat desa menjadi ASN ataupun P3K. Agung menyebut sudah saatnya pemerintah mengapresiasi para perangkat desa dengan membuat desain besar penataan daerah tentang jabatan pemerintahan desa, yang dinilai punya peran besar dalam membangun negara.

"Pada bagian lain, teman-teman perangkat desa juga berharap agar perbaikan tentang tunjangan kesejahteraan serta tentang kejelasan status sebagai pegawai pemerintahan desa ini apakah pemerintah akan diperkuat sebagai pegawai dengan status ASN atau P3K, nanti kita akan kaji," jelas Agung saat ditemui **Parlementaria** usai

RDPU dengan Paguyuban Pamong Desa Indonesia (PPDI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa, (24/1).

Agung juga menyatakan dirinya mendukung perjuangan para

”

**PEMERINTAH
AGAR MELAKUKAN
LANGKAH KONKRET
MENGHENTIKAN
TINDAKAN-TINDAKAN
DI TINGKAT DESA,
MAUPUN PEMERINTAH
DAERAH YANG
SECARA MELAWAN
UNDANG-UNDANG DI
UU NO. 6 TAHUN 2014.**

pejabat kepala desa. "Jadi, ini yang perlu kami tegaskan sesegera mungkin: pemerintah membuat desain besar pemerintahan desa. Kemudian, meminta kepada pemerintah agar membuat juklak-juknis tentang besarnya tunjangan kesejahteraan bagi perangkat desa," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Terhusus mengenai tunjangan ataupun honor perangkat desa, Agung menegaskan agar hal ini tidak hanya berdasarkan penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang dinilai besarnya sangat variatif dan berbeda-beda disetiap daerah karena penganggarannya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan apabila tidak mencukupi, maka dapat menggunakan sumber lainnya dalam APBDes selain Dana Desa.

Lebih lanjut, Agung juga mengingatkan pemerintah agar melakukan langkah konkret menghentikan tindakan-tindakan di tingkat desa, maupun pemerintah daerah yang secara melawan undang-undang di UU No. 6 tahun 2014. Untuk itu, Agung menjelaskan pihaknya sedang melakukan langkah-langkah koordinatif dengan pemerintah sehingga saat pembahasan revisi UU Nomor 6 tahun 2014 semua aspirasi dari pemerintahan desa ini dapat ditampung. [we/aha](#)

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Supriansa: Perlu Adanya Sosialisasi UU PDP Agar Tidak Salah Tafsir



Anggota Komisi III DPR RI Supriansa saat memberikan keterangan pers usai menyampaikan penjelasan di sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa sebagai perwakilan DPR menyampaikan penjelasannya terkait dua perkara gugatan terkait Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam sidang uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi. Supriansa menilai pasal-pasal yang digugat tidak ada pertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

"Para pemohon memohonkan di MK ini untuk diuji materi, berarti yang diuji adalah pasal-pasal yang diuji dan beberapa pasal yang diuji ini mereka menjadikan batu ujinya adalah bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi kami dari DPR setelah melihat secara seksama dan mengukur secara seksama dan secara teliti

bahwa pasal-pasal yang digugat tadi ini tidak ada pertentangan dengan UUD 1945. Mungkin para

”

PERBEDAAN PANDANGAN TERKAIT TAFSIR DI UU PDP INI ADALAH HAL YANG WAJAR DIKARENAKAN UU INI MASIH BARU. UNTUK ITU, MENURUTNYA PERLU DILAKUKAN SOSIALISASI YANG LEBIH MASIF MENGENAI UU PDP INI AGAR MASYARAKAT LEBIH MENYADARI MENGENAI HAK DAN PENTINGNYA UU TERSEBUT.

pemohon salah menafsirkan atau kurang lengkap menafsirkan sehingga kami beranggapan bahwa perlu pendalaman," kata Supriansa saat ditemui **Parlementaria** usai menyampaikan penjelasan di sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi melalui virtual, Senin (30/1).

Menurut Supriansa, perbedaan pandangan terkait tafsir di UU PDP ini adalah hal yang wajar dikarenakan UU ini masih baru. Untuk itu, menurutnya perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif mengenai UU PDP ini agar masyarakat lebih menyadari mengenai hak dan pentingnya UU tersebut.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mengungkapkan, dengan banyaknya kasus pencurian data yang terjadi belakangan ini, UU PDP bisa menjadi solusi dan menjadi rujukan bagaimana masyarakat mengambil langkah hukum jika ia menjadi korban pencurian data. Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini juga berharap dan menyarankan agar semua pihak termasuk DPR ikut aktif mensosialisasikan UU ini termasuk saat reses.

"Maka saya berharap semua pihak termasuk DPR ketika turun reses tentunya juga menyampaikan kepada minimal kepada mitra-mitra kerja kita dan termasuk kepada kelompok-kelompok masyarakat menyampaikan tentang visi dan misi terbentuknya UU PDP ini. Sekaligus kalau perlu pasal-pasal sampaikan kepada mitra kerja dan kepada masyarakat. Supaya masyarakat Paham benar bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sangat penting artinya ada di Republik ini untuk melindungi kerahasiaan daripada data-data yang kita miliki," tutupnya. **we/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Hentikan Eksploitasi Tambang Batu Bara yang Merusak dan Merugikan Negara



FOTO: DIP/PDI

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono foto bersama saat menertibkan kawasan tambang batu bara yang izinnya dipegang oleh PT Mulia Persada Kartanegara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (25/1/2023).

Komisi IV DPR RI bersama dengan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menertibkan kawasan tambang batu bara yang izinnya dipegang oleh PT Mulia Persada Kartanegara, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan ini telah beroperasi di kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang berlaku.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyesalkan bahwa eksploitasi tambang batu bara telah yang merusak lingkungan dan ekosistem alam, dan pastinya merugikan negara. Ia menjelaskan bahwa perlunya turun tangan negara untuk menghukum setegas-tegasnya.

"Keluhan masyarakat, seperti sumber air yang bermasalah, jalan yang berlubang dan berbahaya buat masyarakat. Kita mendorong kepada pemerintah agar dengan tegas menindak sesuai dengan

Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, memberikan ruang lingkup pemerintah dan aparatnya untuk melakukan penertiban dan penindakan secara perdata ataupun pidana," sebut Andi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (25/1).

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono juga menambahkan bahwa tidak boleh ada pihak yang bermain, baik itu pemerintah, Kepolisian bahkan Kejaksaan. Diperlukan sinergi yang sigap dari seluruh instrumen yang berkaitan. Dimana salah satu kasus ditemui ialah perusahaan belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Ia harap agar kasus ini bisa cepat diproses secara hukum.

"Tadi saat kami tinjau salah satu kawasan tambang batu bara disini, salah satu operator menjelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah ada. Namun, kami melihat kesalahan dimana perusahaan seharusnya memiliki IPPKHnya terlebih dahulu, kemudian IUP baru dikeluarkan. Karena itu, hari ini pun kali langsung berikan penyegelan di kawasan ini," tegasnya.

Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti kasus ini melalui rapat kerja gabungan dengan seluruh instrumen terkait. Tentu saja, sekaligus menginventaris dan mengusulkan penyegelan terhadap tambang di kawasan hutan yang belum ada izinnya. Intinya, Komisi IV mendorong pemerintah agar dengan tegas menindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Lingkungan dan Kehutanan. **dip/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi V Terima Aspirasi DPRD Kabupaten Barru Sulsel terkait Pembangunan Infrastruktur

Komisi V DPR RI menerima audiensi dari jajaran DPRD Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Audiensi tersebut terkait dengan beberapa pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jembatan (*movable bridge*) dan sarana-prasarana perkeretaapian. Jajaran DPRD Kabupaten Barru tersebut menjelaskan dengan adanya bantuan *movable bridge* di Pelabuhan Garongkong dinilai bisa memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Menanggapi itu, selaku pimpinan rapat, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras berharap dengan adanya aspirasi ini dapat mempermudah kerja sama untuk melayani beberapa pelabuhan di Sulawesi Selatan yang dinilai memiliki banyak peminat. "Kendala utamanya adalah pada saat air pasang itu kapal kapal tidak bisa menyandar karena terkena air pasang yang lebih tinggi dibanding dengan pelabuhannya, oleh karena itu sangat dibutuhkan untuk bisa melayani kapal kapal dari luar," tutur Aras usai audiensi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1).

Selain mendapatkan aspirasi mengenai usulan tentang *movable bridge* tersebut, Aras juga memberikan hal lain yang harus ditangani Komisi V, seperti penyempurnaan infrastruktur perkeretaapian. Hal itu karena persoalan infrastruktur dan perhubungan masih merupakan tanggung jawab dari Komisi V DPR RI. "Terutama pada masyarakat yang (ada) di kalangan menengah ke



FOTO: AER/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras saat audiensi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1).

bawah masih membutuhkan, dan di daerah yang sudah ada kereta api, itu juga menjadi bagian yang perlu kita sukseskan," ucap Politisi Fraksi PPP.

”

TERUTAMA PADA MASYARAKAT YANG (ADA) DI KALANGAN MENENGAH KE BAWAH MASIH MEMBUTUHKAN, DAN DI DAERAH YANG SUDAH ADA KERETA API, ITU JUGA MENJADI BAGIAN YANG PERLU KITA SUKSESKAN.

Di akhir, Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II itu menjelaskan tentunya Komisi V DPR RI menerima aspirasi dari daerah tersebut. Oleh karena, sudah menjadi tanggung jawab DPR RI sebagai wakil rakyat untuk memberikan nilai manfaat terhadap masyarakat dan kepentingan bersama.

Ia berharap untuk mewujudkan aspirasi ini diperlukan kerja sama Komisi V DPR RI dengan DPRD Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Hal itu agar terlaksananya rencana pembangunan *movable bridge* di beberapa pelabuhan yang berguna untuk kelangsungan mobilitas masyarakat di sekitarnya, seperti melayani kapal kapal dari luar Sulawesi Selatan tanpa ada hambatan.

— ftn,ts/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya





Ditjen Perhubungan Udara Didorong Tuntaskan Persoalan Santunan Korban Kecelakaan Sriwijaya Air

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk segera menuntaskan persoalan santunan korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 yang terjadi tahun 2021 di Perairan Kepulauan Seribu. Mengingat, Lasarus mengungkapkan dirinya sudah mendapat aduan berkali-kali dari pihak korban Sriwijaya SJ-182 yang merasa dipersulit untuk

mendapatkan pembayaran santunan tersebut.

"Terkait pembayaran santunan korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182. Beberapa waktu lalu, kami sudah didatangi berkali-kali dari pihak korban yang merasa dipersulit memperoleh pembayaran santunan. Kemudian, saya mencoba mencari sebabnya apa? Ternyata, sebabnya karena perusahaan asuransi mewajibkan mereka menandatangani surat pernyataan yang mengharuskan mereka tidak boleh menuntut kalau nanti setelah dibayar pihak manapun. Nah keluarga korban ini tidak mau. Hal ini tidak ada titik temu," tutur Lasarus

saat rapat Komisi V dengan Ditjen Perhubungan Udara. Selasa (31/1).

Kemudian, tutur Lasarus, beberapa waktu lalu saat rapat khusus membahas kecelakaan Sriwijaya SJ-182, pihak Sriwijaya saat itu sempat menyatakan bahwa Sriwijaya tidak mensyaratkan kewajiban bagi pihak keluarga korban tidak harus menandatangani surat pernyataan. "Namun setelah kita telusuri lagi, Sriwijaya ngomong langsung ke saya bahwa yang mensyaratkan itu adalah asuransi. Nah disini titik persoalannya," tandas Lasarus.

"Maka, Bu Dirjen bisakah sampaikan kepada kami apa sebetulnya permasalahan ini? Memang adakah aturan yang mewajibkan sehingga asuransi baru boleh membayar dan itu dibenarkan oleh negara? Ada atau tidak ada aturan itu? Kalau tidak ada, kenapa santunan ini belum dibayarkan sampai hari ini? Adakah kaitan dengan yang dimaksud oleh pihak Sriwijaya.? Ini perlu di-clear-kan," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Merespon hal tersebut, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendapat surat dari Sriwijaya Air berisi keterangan bahwa terdapat beberapa korban yang belum dibayarkan hak-haknya. Alasannya, karena korban menuntut kepada pihak Boeing yang memproduksi pesawat.

Maria selanjutnya berjanji bahwa Dirjen Perhubungan Udara dalam satu dua hari kedepan akan melakukan pendalaman dengan pihak maskapai Sriwijaya Air terkait santunan kepada korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 itu. Belum puas akan jawaban Maria, Lasarus kembali bertanya apakah ada aturan harus tanda tangan untuk menerima santunan yang kemudian dijawab 'tidak ada' oleh Maria. "Seingat saya tidak ada," pungkas Maria.

pun/aha

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan membahas Program Kerja Tahun 2023 di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31 / 1/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



PHOTO: ENO/PDT

Intan Fauzi Nilai LRT Jabodebek Layak Operasi Pertengahan 2023

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi menilai kesiapan moda transportasi massal berupa *Light Rail Transit* (LRT) yang menghubungkan beberapa kota meliputi Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) sudah sangat siap untuk segera dioperasikan pada pertengahan tahun 2023. LRT tersebut diyakini oleh Intan kehadirannya dapat sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di wilayah Jabodebek.

"Kesiapan LRT saat kami tadi naik rute Stasiun Harjamukti-TMII (pulang pergi) dan Stasiun Harjamukti-Ciracas (pulang pergi) sudah terlihat siap dan rapi dengan komponennya dari dalam negeri baik yang ada di kereta maupun di stasiun. Jadi saya lihat, target dioperasikannya LRT pada pertengahan tahun 2023 akan dapat terealisasi," ujar Intan usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Stasiun Harjamukti, Depok, Jawa Barat, Jumat (27/1).

"Tentu kami bergembira apresiasi bahwa ketiga BUMN yaitu PT ADHI Karya (Persero) yang membangun stasiun dan kawasannya, kemudian PT INKA (Persero) membangun kereta dan komponen TKDN-nya sudah 40 persen, bertahap akan meningkat. Kemudian yang mengoperasikan dan investornya adalah PT KAI (Persero)," puji Intan.

Menutup wawancara, Politisi Fraksi PAN ini mengharapkan LRT Jabodebek akan segera *Break Even Point* dimana total pengoperasian diberikan kepada PT KAI (Persero) selama 50 tahun. "Kita harapkan, LRT Jabodebek ini tentunya bukan hanya menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan tapi juga aman



FOTO: PUN/PDT

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Stasiun Harjamukti, Depok, Jawa Barat.

nyaman dan juga bagaimana bisa diakses oleh warga dengan harga tiket yang rasional," pungkas Intan.

Sebagaimana diketahui, LRT Jabodebek ini akan dioperasikan menggunakan sistem tanpa masinis

”

KITA HARAPKAN, LRT JABODEBEK INI TENTUNYA BUKAN HANYA MENJADI SALAH SATU SOLUSI UNTUK MENGATASI KEMACETAN TAPI JUGA AMAN NYAMAN DAN JUGA BAGAIMANA BISA DIAKSES OLEH WARGA DENGAN HARGA TIKET YANG RASIONAL.

atau *Communication-Based Train Control* (CBTC) dengan *Grade of Automation* (GoA) Level 3 yang sudah mendapat sertifikasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) yaitu pengoperasian kereta berbasis komunikasi sehingga sistem dapat mengoperasikan kereta dan memproyeksikan jadwal secara otomatis serta disupervisi juga secara otomatis dari pusat kendali operasi.

Meski tanpa masinis, tetap ada petugas yang disebut *Train Attendant* yang bertugas memberikan pelayanan kepada pelanggan dan jika dibutuhkan untuk penanganan dalam kondisi darurat. LRT Jabodebek bakal mengoperasikan 31 rangkaian dimana setiap rangkaian terdiri dari 6 kereta. Dengan kapasitas tersebut, LRT Jabodebek mampu mengangkut penumpang hingga 1.308 orang. — pun/aha



Daeng Muhammad Akan Terus Dampingi Persoalan Konsumen Meikarta

Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad mengatakan bahwa Komisi VI telah menerima aspirasi dari konsumen Apartemen Meikarta. Mereka meminta pendampingan Komisi VI DPR RI dalam menyelesaikan permasalahan yang merugikan konsumen Meikarta. Untuk itu, Komisi VI telah mengundang pihak pengembang Meikarta yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (25/1).

Namun, sangat disayangkan pihak Meikarta tidak menghadiri undangan RDPU yang dikirimkan oleh Komisi VI. Padahal, agenda RDPU tersebut adalah membahas permasalahan konsumen Meikarta. Karena itu, selaku Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta), ia menyayangkan ketidakhadiran pihak PT MSU tersebut.

"Tadi saya berkali-kali bicara bahwa ini pelecehan terhadap parlemen. Karena bagi kita ini kepentingan bukan hanya kepentingan Anggota DPR, tapi kepentingan ada ribuan orang yang menyampaikan aspirasinya ke Komisi VI minta didampingi oleh kita," ujar Daeng kepada **Parlementaria**, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Daeng menegaskan, bahwa DPR sebagai lembaga negara yang menjadi perwakilan rakyat, harus



Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad.

memberikan perlindungan ketika ada rakyat menjadi korban akibat dari investasi yang dilakukan oleh pihak



TADI SAYA BERKALI-KALI BICARA BAHWA INI PELECEHAN TERHADAP PARLEMEN. KARENA BAGI KITA INI KEPENTINGAN BUKAN HANYA KEPENTINGAN ANGGOTA DPR, TAPI KEPENTINGAN ADA RIBUAN ORANG YANG MENYAMPAIKAN ASPIRASINYA KE KOMISI VI MINTA DIDAMPINGI OLEH KITA

Meikarta. Bahkan, Daeng mengakui ia telah memiliki data transaksi jual beli apartemen Meikarta yang menyatakan adanya kesalahan oleh pihak pengembang yang kemudian malah ditanggung oleh konsumen.

"Saya punya bukti-bukti, termasuk data ini orang beli 2017, ini beli tunai karena tidak dapat unitnya bahkan kalau mau dikembalikan uangnya ditawarkan dengan potongan Rp63 juta, yang harga (tipe) studio. Kalau mau dipindahkan unit harganya menjadi Rp400 juta sekian. Itu artinya apa mereka? Membikin proyek itu (harusnya) sudah terestimasi dengan kajian-kajiannya. Ketika mereka bikin kesalahan, wanprestasi, kenapa konsumen harus menanggung? Ini kan zalim, gitu," imbuhnya.

[gam,bia/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Legislator Nilai Pemerintah Langgar UU PPP Terkait Pembahasan RUU EBET

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai Pemerintah telah melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) terkait pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Pasalnya, Surat Presidennya telah dikirim tanggal 21 September 2022 namun tanpa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

DIM yang seharusnya diserahkan Pemerintah ke DPR, paling lambat 60 hari sejak diterimanya surat dari DPR-RI, namun baru diterima dan dibahas kemarin, Selasa, (24/1). Artinya pengiriman DIM tersebut sudah jauh melewati batas waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Karena itu Mulyanto minta kepada Pemerintah dan Pimpinan Komisi VII untuk memitigasi risiko RUU EBET, yang akan dibahas.

Tujuannya agar tidak cacat hukum dan dibatalkan MK (Mahkamah Konstitusi) bila kelak sudah diketok. Atau setidaknya tidak diajukan *judicial review* oleh masyarakat.

"DIM memang sudah diterima oleh DPR RI, namun dari segi waktu sudah jauh melewati batas yang diatur UU, yakni 60 hari setelah RUU dikirim oleh DPR RI," ujar Mulyanto kepada Media, Rabu (25/1). Mul, begitu ia biasa disapa, khawatir undang-undang yang dihasilkan itu akan dianggap cacat hukum, bahkan beresiko digugat atau di *judicial review* ke MK.

”

DIM MEMANG SUDAH DITERIMA OLEH DPR RI, NAMUN DARI SEGI WAKTU SUDAH JAUH MELEWATI BATAS YANG DIATUR UU, YAKNI 60 HARI SETELAH RUU DIKIRIM OLEH DPR RI

Karenanya, ia menilai Pemerintah telah menabrak UU No.13/2022 Tahun 2022, khususnya Pasal 49 Ayat 2. Di sana dikatakan bahwa Presiden menugasi Menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang disertai dengan DIM bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. **ayu/aha**

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.



FOTO: OJI/PDT



Negara Perlu Hadir Guna Tekan Biaya Haji yang Terus Naik



FOTO: RSB/PDT

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BPIH Tahun 1444 H/2023 M.

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta kehadiran negara pada penyelenggaraan rangkaian ibadah haji. Hal itu diperlukan untuk menekan biaya haji reguler yang terus merangkak naik, mengingat pengguna haji kategori tersebut mayoritas bukan berasal dari kalangan atas.

"Jadi kalau melihat beban biaya haji ini semakin lama semakin mahal. Ingat Pak, yang berangkat haji reguler itu 70 persen orang-orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu *nggak* mau (pakai haji reguler), pakailah haji plus yang kemarin ramai adalah Haji *Furoda*. Ini maksud saya. Yang reguler ini kan kita selalu bahas tiap tahun.

Kenapa ini selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun. Ya kehadiran negara sampai di mana ini?" ujar Abdul Wachid dalam RDP Panja BPIH Tahun 1444 H/2023 M di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (26/1).

Sebelumnya, Wachid sempat membandingkan besaran biaya penyelenggaraan dan beban biaya haji yang dibayarkan oleh calon jemaah haji asal Malaysia dan Indonesia. "Tadi malam saya mendapatkan masukan bahwa haji yang dilaksanakan oleh Malaysia harganya Rp 108 juta tapi beban jemaah haji Malaysia hanya Rp30 juta. Kalau *nggak* salah ini. Artinya itu di-cover oleh negara dan di-cover oleh dana Haji," tambahnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah II ini menyarankan agar negara melalui kementerian terkait baik Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan agar bisa mempersiapkan peran mereka setiap tahunnya, terutama terkait anggaran untuk mendukung penyelenggaraan haji.

Wachid juga menyinggung adanya keterlibatan perusahaan negara, dalam hal ini Garuda Indonesia dan Angkasa Pura. Menurutnya, jika tidak bisa membuat anggaran untuk membantu penyelenggaraan ibadah haji, maka para BUMN tersebut bisa melakukannya melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Terkait dengan dukungan layanan kesehatan bagi bagi jemaah Haji, Wachid menyoroti kualitas dan variasi obat-obatan yang disiapkan Kemenkes di berbagai embarkasi. "Bagaimana kalau negara hadir, Kementerian Kesehatan menyiapkan satu anggaran untuk haji, dengan obat-obatan yang disiapkan yang mumpuni yang bagus yang berkualitas. Kalau perlu jangan generik," tambahnya.

Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar masing-masing lembaga ikut andil dalam membantu pelaksanaan ibadah haji termasuk dalam mitigasi saat munculnya gejolak kurs dan harga bahan bakar. Tanpa adanya persiapan, gejolak akan berujung pada kenaikan dana penyelenggaraan yang berimbas pada biaya yang harus dibayarkan. **uc/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Legislator Tekankan Kesejahteraan Honorer Nakes dan Non-Nakes Patut Diperjuangkan

Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto menyatakan kesejahteraan pegawai honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Non Nakes patut diperjuangkan. Sebab, menurutnya, mereka selama ini telah bekerja melakukan pengabdian dan berjuang tanpa pamrih. Dalam penyelenggaraan negara, terdapat aspek Kesehatan yang menjadi bentuk tanggung jawab Pemerintah yang mesti dihadirkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun ironisnya, sejauh ini kesejahteraan

bagi Honorer Nakes dan Non Nakes masih memprihatinkan.

"Honorer Nakes dan Non Nakes dengan pengabdian yang sudah lama itu harus dihargai. Jangan habis manis sepah dibuang, kan begitu. Saya berpikir mereka harus dihargai seperti (profesi) Hakim, kan mereka adalah Wakil Tuhan, justru tenaga Kesehatan itu adalah Wakil Tuhan," ujarnya saat ditemui **Parlementaria** se usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX dengan Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai Honorer Nakes dan Non Nakes perlu dihargai lantaran mereka adalah orang-orang yang telah berjuang tanpa pamrih dan tulus dalam melayani pasien-pasiennya. "Jadi harus kita perjuangkan baik dari DPR, (pemerintah) daerah, kita bersinergi. Mereka harus diperjuangkan, mengingat di dalam penyelenggaraan negara kan ada yang pertama adalah tentang Kesehatan, kedua Pendidikan, ketiga Kesejahteraan. Nah Nakes ini, dia di bidang Kesehatan, kesejahteraan juga harus diperhatikan. Supaya mereka juga melayani pasien dengan gembira ya," tuturnya.

Itet menilai kesejahteraan Nakes dan Non Nakes selama ini tidak sesuai dengan harapan dan statusnya yang dinilai masih berstatus tidak jelas. "Masa ada Nakes yang honornya cuma dari 60 ribu, 90 ribu, 100 ribu, ini kan tidak manusiawi, padahal mereka melayani manusia. Inilah harapan saya, yuk kita mari bersama-sama berjuang untuk mengangkat mereka supaya mereka bisa juga sejahtera," harap Legislator dapil Lampung II

Untuk menyelesaikan permasalahan status Honorer Nakes dan Non Nakes untuk dapat diangkat menjadi PPPK, menurutnya perlu dibenahi dari hulu hingga hilirnya. Perlu ada pembenahan *database* agar bisa membuat manajemen yang baik untuk bisa menyelesaikan permasalahan kesejahteraan Honorer Nakes dan Non Nakes. [gal/rdn](https://www.gal.rdn)



FOTO: MUIJ/PDI

Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX dengan Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (25/01/2023).



Komisi IX Gotong Royong Membantu Korban Gagal Ginjal Akut Pada Anak



FOTO: MUN/PDI

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat menerima audiensi Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan, terkait korban Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Kurniasih Mufidawati menerima audiensi Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan, terkait korban Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA). Penting bagi DPR untuk mendesak Pemerintah agar mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan kasus gagal ginjal akut. Charles pun mendesak Kemenkes agar memberikan santunan kepada para korban, menurutnya negara harus bertanggung jawab untuk menuntaskan permasalahan tersebut dan bisa menjamin kesehatan dan keamanan obat serta makanan bagi rakyatnya. "Oleh karena itu nanti kami

sekali lagi dalam rapat dengan Kemenkes akan meminta Menteri Kesehatan untuk menjalankan komitmen yang sudah pernah dibuat di rapat pada dua November yang sudah menjadi kesimpulan dalam rapat di Komisi IX, dimana Kemenkes akan memberikan santunan dan memberikan biaya pengobatan kepada seluruh korban gagal ginjal akut. Ini akan menjadi komitmen kami," tandas Charles di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

Bahkan Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini pun memberikan contoh lebih dulu dengan memberikan Rp50 juta kepada tim advokat untuk diberikan kepada para korban, tak hanya dia Anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay

sudah menginisiasi lebih dulu dengan memberikan Rp20 juta kepada korban, tak menutup kemungkinan para Anggota Komisi IX yang lainnya ikut gotong royong membantu para korban.

Sebanyak 200 anak meninggal dunia akibat obat sirup cair yang tercemar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DG). Data tersebut merujuk pada data Kementerian Kesehatan per 23 November 2022. Adapun jumlah korban yang menderita gagal ginjal akut sebanyak 324 anak. Sejumlah keluarga korban obat sirup beracun kemudian menggugat sembilan pihak yang dinilai bertanggung jawab.

Mereka adalah Kemenkes dan BPOM. Kemudian, PT Afi Farma Pharmaceutical Industry dan PT Universal Pharmaceutical Industries selaku produsen obat. Selanjutnya, lima perusahaan penyuplai bahan baku obat yakni, PT Megasetia Agung Kimia, CV Budiarta, PT Logicom Solution, CV Mega Integra, dan PT Tirta Buana Kemindo. Para penggugat meminta agar tergugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil.

"Kita semua Komisi IX sepakat bahwa negara harus bertanggung jawab, bahwa kejadian ini adalah tanggung jawab negara, karena negara adalah pihak yang memiliki perangkat untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mengkonsumsi obat-obatan dan makanan secara aman tetapi ini tidak dilakukan dengan baik," tandas Charles. **ssb/aha**



Komisi X Serap Aspirasi Perbaiki Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Indonesia



FOTO: DEP/PDT

Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid saat memimpin kunjungan kerja Komisi X ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid memimpin kunjungan kerja Komisi X ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Dalam kunjungan kerja spesifik ini, tim Komisi X bertemu dengan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Ahmad dan Plt Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Riset Sri Gunadi Partawi.

Di acara ini Komisi X menyerap aspirasi guna memperbaiki sistem pendidikan perguruan tinggi baik negeri atau pun swasta. Komisi X berpendapat, saat ini sangat

diperlukan penguatan kemampuan Perguruan Tinggi, baik PTN maupun PTS, dalam mencetak SDM yang berpengetahuan dan terampil, berkarakter, bermoral dan bermental kuat, peduli serta bertanggung jawab.

"Perbaiki sistem dan peningkatan kesejahteraan untuk para dosen, Perbaiki sistem dalam seleksi siswa mandiri. Kami mendapat usulan dan aspirasi dan kami menangkap ada beberapa ide dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat. Tadi ada masalah dosen-dosen yang belum naik pangkat," papar Sodik di Banjarmasin, Kamis (26/1).

Kunjungan ini bertujuan melaksanakan fungsi Komisi X di bidang pengawasan pelaksanaan pendidikan tinggi, terutama dalam mencapai tujuan menyiapkan SDM yang berpengetahuan dan terampil, berkarakter, bermoral dan bermental kuat, peduli serta bertanggung jawab.

Perguruan tinggi dituntut mampu mencetak SDM unggul, terampil dan berkarakter. Tapi meskipun demikian perguruan tinggi masih menghadapi masalah mutu, relevansi, akses, daya saing dan tata kelola. Ahmad mengusulkan agar kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR bisa mendorong perguruan tinggi agar lebih produktif. Misalnya pengelolaan perguruan tinggi yang berbasis pada kepentingan lokal.

"Kita berharap kebijakan dari Pemerintah pusat dan DPR RI bisa mendukung manajemen peningkatan mutu perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi di Indonesia punya daya saing," ungkap Ahmad. Komisi X pun memahami bahwa saat ini perlu dukungan dan keberpihakan terhadap penyelenggaraan PTS sebagai penanggung jawab pendidikan tinggi yang dominan di Indonesia.

Permasalahan seperti *dis-equalities*, *quality*, *relevancy*, dan *competitiveness* yang berlangsung pada PTS, agar segera mendapatkan solusi. Selain itu juga diperlukan *refocusing* kinerja PTN, yang didukung oleh peningkatan mutu, relevansi, akses, daya saing dan tata kelola, untuk mendapatkan *output* yang maksimal. **ssb/aha**



Banyak Program Pendidikan yang Baik Tidak Didukung Anggaran

Tim Kunjungan Kerja Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf melakukan diskusi dengan rektor dan jajaran sivitas akademika Universitas Negeri Medan (Unimed) dan beberapa universitas negeri dan swasta lainnya. Diskusi ini guna menyerap masukan dan informasi terkait persoalan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sumut.

"Hari ini kita mendengarkan (masukan) dari perguruan tinggi baik swasta, negeri, maupun politeknik di Kota Medan dan Sumatera Utara. Banyak hal yang terkait dengan masalah kebijakan-kebijakan yang mungkin dirasa masih belum bisa disesuaikan dengan yang ada di daerah, terutama dari sisi kebijakan anggaran, akreditasi, biaya dan lain-lain," ungkap Dede di Medan, Sumut, Kamis (26/1).

Ia menyatakan, program yang baik sering kali tidak didukung oleh faktor anggaran yang besar dan masih banyak terjadi kendala di lapangan. Di satu sisi, ada beberapa perguruan tinggi yang bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan yang baru, tetapi banyak juga kampus-kampus swasta yang belum banyak bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan baru tersebut.

"Ini butuh proses dan butuh keberpihakan anggaran. Kita tentu akan mendorong lebih banyak lagi kebijakan yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jangan sampai kebijakannya terlalu tinggi tetapi anggarannya tidak mencukupi," kata Dede.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Negeri



FOTO:DEP/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memberikan sambutan pada diskusi dengan rektor dan jajaran sivitas akademika Universitas Negeri Medan (Unimed) dan beberapa universitas negeri dan swasta lainnya.

Medan (Unimed) Syamsul Gultom menyampaikan bahwa Unimed saat ini memiliki 29.037 mahasiswa, 1058 dosen dan 464 tenaga kependidikan. UNIMED memiliki 82 Program Studi dengan akreditasi 61 persen akreditasi Unggul/A, 33 persen terakreditasi Baik Sekali/B/Baik dan 6 persen prodi baru yang sedang

”

PROGRAM YANG BAIK SERING KALI TIDAK DIDUKUNG OLEH FAKTOR ANGGARAN YANG BESAR DAN MASIH BANYAK TERJADI KENDALA DI LAPANGAN.

menunggu proses visitasi BAN-PT.

Dengan jumlah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan tersebut, Unimed mau tidak mau harus mengembangkan gedung dan sarana belajar lainnya secara komprehensif. Unimed saat ini sudah selesai membangun gedung kuliah FMIPA empat menara dengan dana PNBPN, karena sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun tidak ada bantuan pembangunan gedung sarana belajar dari pemerintah.

Padahal, setiap tahunnya semua PTN dan PTS terus berkembang dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. "Melalui pertemuan yang mulia ini, kami titipkan suara kami dari PTN dan PTS di Provinsi Sumatera Utara, agar ada perhatian yang serius dari pemerintah," ucapnya. dep/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya

Komisi XI Dukung BRI Maksimalkan Potensi Bisnis

Komisi XI DPR RI mendukung upaya Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menjalankan strategi bisnisnya, termasuk memaksimalkan potensi bisnis yang ada dalam ekosistemnya. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. BRI, Tbk dengan agenda pembahasan kinerja keuangan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1).

"Komisi XI mendukung upaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam menjalankan strategi kinerja bisnis tahun 2023 yang diarahkan pada ekspansi kredit, memperkuat pertumbuhan bisnis *value chain* dan memaksimalkan potensi bisnis ekosistem Bank Rakyat Indonesia" ujar Fathan, Wakil Ketua

”

KOMISI XI MENDUKUNG UPAYA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DALAM MENJALANKAN STRATEGI KINERJA BISNIS TAHUN 2023 YANG DIARAHKAN PADA EKSPANSI KREDIT, MEMPERKUAT PERTUMBUHAN BISNIS VALUE CHAIN DAN MEMAKSIMALKAN POTENSI BISNIS EKOSISTEM BANK RAKYAT INDONESIA



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan.

FOTO: MRR/PDT

Komisi XI DPR RI saat membacakan kesimpulan rapat.

Fathan yang menjadi pimpinan rapat tersebut, juga menyampaikan bahwa BRI perlu mengoptimalkan kontribusi pendapatan negara, memperkuat fungsi intermediasi pada sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja melalui penguatan UMKM, mempercepat ekonomi nasional, UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan mendukung peningkatan industri pengolahan yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat.

Digitalisasi perbankan pun tak luput menjadi perbincangan pada rapat ini. Komisi XI meminta BRI untuk menjaga keamanan transaksi dan perlindungan data nasabah, terutama setelah BRI secara penuh menggunakan inovasi digital dalam transaksi perbankannya.

"PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank dengan

menggunakan transaksi inovasi digital harus menjaga keamanan transaksi bagi nasabah dan perlindungan data nasabah," lanjut Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Pada kesimpulan rapat tersebut, disinggung pula mengenai rencana mitigasi akibat kenaikan suku bunga Bank Central Amerika (*The Fed*) yang disinyalir dapat berimbas pada likuiditas valuta asing. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga harus menjaga kualitas aset dalam menghadapi risiko kenaikan inflasi dan perlambatan ekonomi.

Sebagai perusahaan yang sebagian besarnya dimiliki oleh pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk harus menjalankan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) yang dapat diterapkan dalam restrukturisasi kredit dan penghapusbukuan bagi nasabah.

[uc/rdn](https://uc.rdn)



Legislator Prihatin Banyak Subsidi untuk Rakyat yang Dikurangi

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti naiknya anggaran negara sekaligus ironi

berkurangnya beberapa subsidi untuk rakyat. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas pengurangan nilai manfaat dana haji, pembatasan subsidi pupuk, pengurangan subsidi BBM, kenaikan pajak PPN, hingga rencana kenaikan tiket KRL.

"Di tengah naiknya anggaran negara secara drastis menembus Rp3.041 triliun, tetapi disisi lain banyak subsidi untuk rakyat perlahan dikurangi ini ironi di tengah perekonomian masyarakat yang belum pulih," kata Anis dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria** pada Sabtu (28/1).

Legislator Dapil DKI Jakarta I ini juga mengkritik istilah 'subsidi tidak tepat sasaran' yang seringkali digunakan untuk mengurangi hingga mencabut subsidi. Menurutnya, hal ini menunjukkan kebijakan subsidi Pemerintah belum berpihak pada rakyat.

"Seperti misalnya tiket KRL yang dianggap terlalu murah oleh pemerintah, sehingga perlu dibedakan berdasarkan kaya dan miskin, padahal di negara maju manapun selalu mendorong rakyatnya untuk menggunakan transportasi publik yang terjangkau, selain mengurangi emisi juga solusi bagi problem kemacetan," ujarnya.

Politisi PKS ini menyampaikan bahwa akan senantiasa memperjuangkan agar tidak ada pengurangan subsidi bagi rakyat, misalnya menahan kenaikan tarif listrik bagi golongan bawah serta LPG ukuran 3 kilogram. Anis

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.



FOTO: EOT/PDT

mengingatkan bahwa, tujuan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang dalam bagian pembukaan UUD 1945.

”

DI TENGAH NAIKNYA ANGGARAN NEGARA SECARA DRASTIS MENEMBUS RP3.041 TRILIUN, TETAPI DISISI LAIN BANYAK SUBSIDI UNTUK RAKYAT PERLAHAN DIKURANGI INI IRONI DI TENGAH PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BELUM PULIH.

"Karena begitu terjadi kenaikan, angka inflasi akan semakin meningkat sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi terdegradasi. Jadi kesejahteraan itu untuk kemaslahatan publik jangan bagi kelompok atau pribadi saja, jangan sampai *mindset* pemerintah itu bahwa rakyat adalah beban, seperti pernah disebut misalnya pensiunan ada beban negara, ini kan tidak pas dengan arah tujuan bernegara," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini mengingatkan bahwa setiap kebijakan subsidi harus melalui kajian yang komprehensif dan selaras dengan semangat Undang-undang Dasar, sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dan merasakan keberpihakan dari pemerintah. **uc/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Perizinan Edar Obat dan Makanan Menjadi Aspek Penting dalam Harmonisasi RUU POM

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan rapat Panitia Kerja Harmonisasi Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dengan Komisi IX DPR RI, di Ruang Rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1). Dalam rapat ini perizinan edar obat dan makanan menjadi aspek penting dalam pembahasan. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas berpendapat bahwa khusus obat dan makanan yang paling berhak mengeluarkan izin edar harus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dia juga mengungkapkan soal perizinan

edar obat dan makanan akan ada keterkaitan dengan UU Ciptakerja, maka penting untuk diperhatikan soal sinkronisasi dan harmonisasinya. "Soal perizinan berusaha ada keterkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi hampir di semua negara untuk meluluskan satu produk itu butuh waktu yang lama, kalau di Uni Eropa mereka butuh waktu 210 hari untuk satu produk tertentu baru izin edarnya keluar. Kalau di Amerika itu malah lebih lama itu 500 hari," papar Supratman.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menanyakan apakah dalam rancangan undang-undang ini ingin mengambil contoh yang berlaku di Uni Eropa

atau Amerika. "Apakah kita ingin mencontoh seperti Uni Eropa punya dia sistemnya terpusat. Jadi kalau di negara-negara bagian Amerika itu dia punya hak untuk mengeluarkan, jadi tidak terpusat. Itu salah satu aspek kelembagaan yang perlu kita pikirkan," jelas Supratman.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengungkapkan RUU POM diusulkan akan mengatur pengawasan setelah beredar (*post market*) terhadap obat dan makanan. Menurutnya pengaturan ini akan menjadi jaminan makanan maupun obat yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Sebab selama ini, pengawasan obat dan makanan pasca beredar dinilai belum maksimal. "Selama ini kita ini tidak punya kekuatan dalam hal menjamin yang namanya kesehatan, makanan dan obat yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, kita nggak punya jaminan apapun," kata Nihayatul.

Selain *post market*, regulasi rokok elektrik atau vape juga akan dibahas di dalam RUU ini. Usul ini pun berasal dari anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang membahas RUU POM beberapa waktu belakangan. Ninik bilang, persoalan vape masih meresahkan karena belum ada regulasi yang mengatur secara rinci. "Vape akan menjadi PR karena selama ini belum bicara soal vape, dan persoalannya seperti apa. Nah, (dalam vape) salah satunya (ada) zat cairan psikotropika, nah ini yang akan kita diskusikan di POM," jelas Ninik.

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas.



FOTO: RSEB/PDT

ssb/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Indonesia Dinilai Siap Laksanakan Pemilu 2024 Ditengah Ketidakpastian Global



Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah berfoto bersama usai acara Seminar Nasional Badan Keahlian DPR RI, di Hotel Borobudur.

Pemilu tahun 2024 dinilai mengkhawatirkan bagi Indonesia, sebab banyak negara yang mengalami krisis global. Pandemi Covid-19 yang relatif sudah berakhir menyisakan banyak *backlog* yang perlu dibenahi, dan dampak ekonominya masih akan terasa di tahun selanjutnya. Kondisi perang di Ukraina yang notabene merupakan negara pemasok pangan bagi negara-negara yang menjadikan gandum sebagai makanan pokok di Eropa, Amerika dan Afrika, membuat krisis berkepanjangan dan berisiko darurat.

"Indonesia memang dibayangi oleh resesi global akibat pandemi,

perang dan lainnya, namun saya tegaskan pemilu 2024 itu harus tetap berjalan itu kan pesta demokrasi 5 tahun sekali. Sekarang yang perlu dipikirkan bagaimana caranya agar pesta demokrasi tetap berjalan tapi tidak membebankan masyarakat," kata Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah dalam acara Seminar Nasional Badan Keahlian DPR RI, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/1).

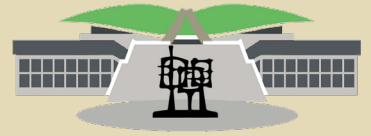
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan Komisi Pemilihan Umum RI pada 14 Februari 2022 telah meluncurkan hari pemungutan suara Pemilu 2024. Pemungutan suaranya sendiri

akan digelar 24 bulan setelah peluncuran, yakni 14 Februari 2024. Bagi Indonesia, tahun 2023 memiliki satu peristiwa tersendiri masa kampanye pemilu 2024. Masa kampanye yang berlangsung dari bulan November hingga Februari tahun selanjutnya.

"Kalo pemilu mau diperpanjang itu harus *judicial review* prosesnya tentu sangat panjang. Sekarang bagaimana caranya agar kita siap menghadapi resesi? Pertama jangan boros, rajin menabung dan investasi jangka panjang jika hal ini dijalankan saya rasa resesi global akan terhindar dari Indonesia," imbuh Dimiyati. **tn/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono saat melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 71 CPNS dan 31 pejabat fungsional di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (1/02/2023). FOTO:JKA/PDT



Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono berfoto bersama dengan lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memasuki masa purnabakti, didampingi pejabat Setjen usai acara pelepasan pensiun. FOTO:RSB/PDT



Anggota PIA DPR RI Nita Dolfie bersama anggota lainnya memberikan keterangan usai membagikan nasi kotak di jalan Palmerah. FOTO:JKA/PDT

